

BAB IV TEMUAN

1.1. PENGANTAR

Pada tulisan ini penulis mencoba melihat bagaimana budaya politik masyarakat Suku Laut beserta dengan tipe dan faktor yang mempengaruhinya akan tetapi lebih kepada pengukuran bagaimana kesiapan dari masyarakat Suku Laut itu sendiri untuk ikut berpartisipasi dalam proses Pilkada. Kesiapan yang penulis maksud apakah ke depan harus adanya pembatasan kampanye politik bagi partai politik maupun wewenang pemerintah dalam hal melibatkan masyarakat atas urusan Negara, namun lebih mengedepankan pembelajaran politik terutama pada masyarakat yang kurang pendidikan politik Pilkada. Lebih lanjut penulis melihat belum adanya kajian Suku Laut yang menelaah dari sudut pandang budaya politik.

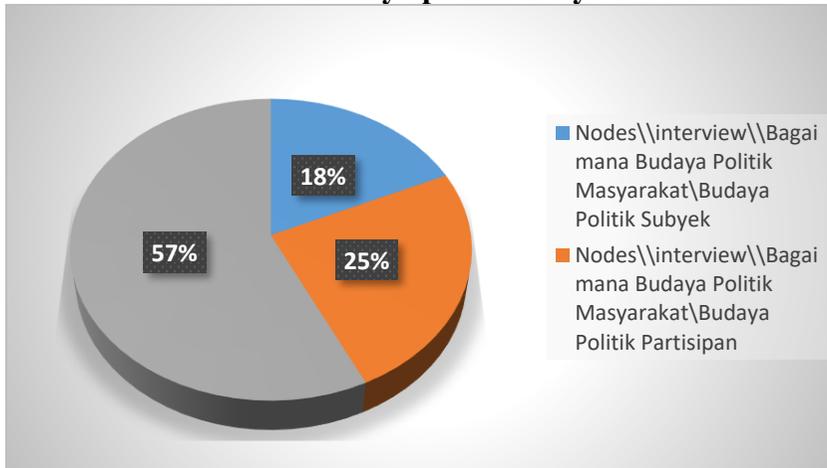
Kajian budaya politik masyarakat Suku Laut kiranya akan memberikan gambaran bagaimana interaksi masyarakat lokal diarah politik dan kedudukan budaya lokal itu sendiri ketika berhadapan dengan sistem politik. Analisis kajian budaya politik masyarakat dan faktor pembentuk budaya politik masyarakat Suku Laut ini akan menggunakan nilai-nilai kognitif, afektif dan evaluatif yang menunjukkan kearah mana budaya politik, apakah budaya politik parokial, subyek, partisipan atau budaya politik campuran. Sedangkan faktor pembentuk budaya politik mengacu pada partisipasi

keluarga, partisipasi lingkungan kerja dan partisipasi sekolah (Almond dan Verba, 1984).

1.2. Budaya Politik Masyarakat Suku Laut

Aspek-aspek orientasi politik masyarakat Suku Laut baik itu pengetahuan tentang sistem politik, perasaan dan tindakan terhadap sistem politik Pilkada kiranya membawa masyarakat Suku Laut pada tipe kebudayaan politik yang Parokial. Menjelaskan bagaimana budaya politik masyarakat Suku Laut maka dapat dilihat dari grafik 1.1, merupakan hasil dari olah data yang telah peneliti lakukan untuk menjawab bagai mana budaya politik masyarakat Suku Laut.

Grafik 1.1. Budaya politik masyarakat Suku Laut



Sumber: olahan data primer Nvivo 12 Plus 2020.

Menjelaskan olahan data grafik 1.1 di atas maka didukung dengan pengklasifikasikan orientasi kognitif, afektif dan evaluatif masyarakat Suku Laut yang telah penulis bahas sebelumnya. Penulis menemukan beberapa hasil

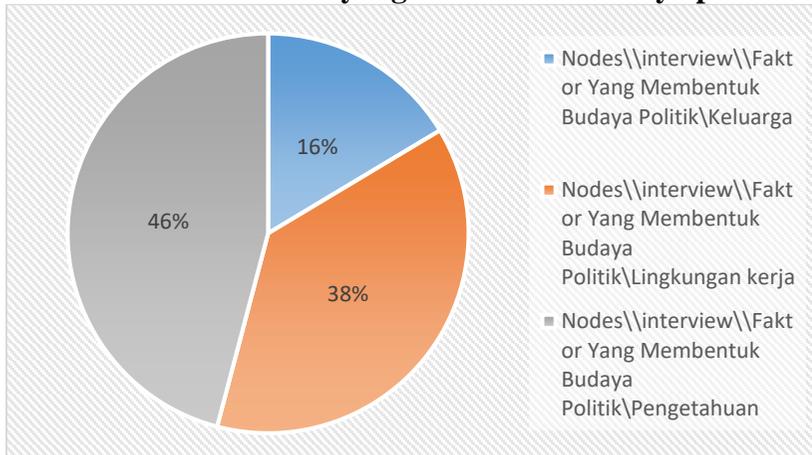
dari olahan data seperti yang telah penulis paparkan di atas hingga merujuk pada hasil budaya politik tipe parokial lebih dominan pada masyarakat Suku Laut Singkep Barat Kab. Lingga. Pada aspek budaya politik parokial hasil olah data menunjukkan 57% sedangkan pada aspek budaya politik partisipan 25% dan aspek budaya politik subyek hanya 18%. Angka positif bahwa masyarakat Suku Laut termasuk dalam kategori budaya politik parokial ini tentunya didapatkan dari hasil analisis mendalam olah data penelitian. Terkait 28% pada aspek budaya politik partisipan, angka tersebut muncul dikarenakan masyarakat Suku Laut masih termasuk masyarakat yang menerima sistem politik dan maslah ikut berpartisipasi dalam Pilkada. Kemudian 18% aspek budaya politik subjek muncul dikarenakan masyarakat Suku Laut setidaknya masih menyadari dan menerima adanya sistem politik Pilkada sekalipun tidak memahaminya dengan baik. Sekalipun budaya politik masyarakat Suku Laut hari ini masih terbilang budaya politik parokial, tetapi tidak menutup kemungkinan kebudayaan politik masyarakat Suku Laut ke depan berubah seiring berjalannya waktu. Menurut kajian Dwi Rianto Jatmiko, dkk (2019) Penelitiannya mengatakan pengaruh politik masyarakat budaya pada dasarnya membuat budaya politik komunitas masyarakat lebih beradab. Sementara itu Wasino (2015) mengatakan tiga prinsip budaya politik untuk menuju modernisasi birokrasi, yaitu nilai berani, nilai memiliki dan nilai menjaga. Perubahan kepada arah yang negatif ataupun positif nilai budaya politik Suku

Laut merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memberdayakan masyarakat dan tanggungjawab bersama saling membantu dan bahu membahu.

1.3. Faktor Pembentuk Budaya politik Masyarakat Suku Laut

Partisipasi sekolah dan kompetisi warga Negara yaitu partisipasi informal di sekolah lebih terkait erat dengan kompetisi politik diantara mereka yang pendidikan terbatas dibanding mereka yang pendidikan tinggi. Partisipasi dalam pekerjaan dan kompetensi politik yaitu adanya hubungan luasnya kesempatan berpartisipasi dalam tempat kerja akan mempengaruhi politik subyektif. (Almond dan Verba, 1984: 345-357).

Grafik 1.2. Faktor yang membentuk budaya politik Suku Laut



Sumber: Olahan data primer Nvivo 12 Plus 2020.

Pada Grafik 1.2 merupakan hasil olahan data menunjukkan pengetahuan merupakan faktor yang paling tinggi yaitu 46% kemudian faktor lingkungan kerja 38% dan faktor keluarga 16% dalam membentuk budaya

politik masyarakat Suku Laut pada Pilkada Gubernur Kepri tahun 2015. Pengetahuan politik Pilkada yang rendah pada masyarakat Suku Laut telah mempengaruhi orientasi masyarakat Suku Laut terhadap sistem Pilkada. Minimnya komunikasi terkait politik Pilkada dan relasi juga telah mempengaruhi orientasi politik masyarakat Suku Laut dan adanya sedikit dominasi Kepala keluarga masyarakat Suku Laut juga telah memberikan sedikit pengaruh terhadap orientasi politik Pilkada masyarakat Suku Laut. Mereka yang angkat bicara mengomentari pertanyaan penulis pada saat interview adalah mereka yang tamat SD (sekolah dasar). Lebih lanjut bagi masyarakat Suku Laut Pilkada bukanlah hal yang begitu penting untuk mendapatkan perhatian lebih banyak, pemilu hanya sebagai suatu kegiatan yang boleh mereka ikuti atau boleh tidak mereka ikuti, hal tersebut tergantung pada masyarakat Suku Laut itu sendiri. Masyarakat suku laut memandang inti dari ikut sertanya mereka dalam Pemilu adalah bagaimana mereka memilih pemimpin yang mereka anggap baik, terlepas apakah mereka tahu atau tidaknya visi dan misi para calon. Menentukan calon yang baik bagi masyarakat Suku Laut kedekatan dan tatap muka merupakan bentuk yang pas untuk mereka memberikan kepercayaan kepada pasangan calon. Sebagai contoh, visi dan misi bukan aspek yang penting bagi masyarakat Suku Laut dalam menentukan pilihan politik. Penulis melihat bahwa pendidikan sekali lagi menjadi hal yang sangat diperlukan masyarakat Suku Laut Saat ini.

Penulis percaya Suku Laut akan menjadi berbeda sikap politiknya apabila adanya perbaikan pembelajaran tekaiat politik. Masyarakat Suku Laut Tetap memiliki pilihan dan sikap tersendiri dalam politik, bukanlah pilihan dan sikap balas budi dan sikap yang diinstruksikan.